

**KERABAT SEBAGAI MESIN POLITIK:
KLIENTELISME DAN KEMENANGAN KANDIDAT PEREMPUAN PEMULA PADA
PEMILU LEGISLATIF DPRD KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024**

Maria Kristiana Gadhe¹, Valina Singka Subekti²

^{1,2}Universitas Indonesia

Email Korespondensi: riantikristianagadhe11@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze how kinship-based clientelism influences the victory of female novice candidates in a political space that tends to be dominated by a patriarchal system. The research findings indicate that in the context of Maria Roswita Mea Laki's victory, the role of the nuclear family, a campaign team consisting of relatives, and the provision of social assistance were very dominant, which in turn strengthened local community solidarity in gaining voter support. In addition, the role of Mosalaki (traditional leaders) provided important symbolic legitimacy, as did cadet/farmer groups that served as low-cost mobilization arenas based on social solidarity at the village level. These social networks contributed significantly to the campaign's success, particularly in the context of the Nagekeo community, which remains strongly tied to family and customary ties. This study utilizes Herbert Kitschelt's (2000) theory of clientelism and social networks.

Keywords: Clientelism, Social Networks, Female Candidate Victory, Legislative Elections.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana klientelisme berbasis kekerabatan memengaruhi kemenangan kandidat perempuan pemula dalam ruang politik yang cenderung didominasi oleh sistem patriarkal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks kemenangan Maria Roswita Mea Laki, peran keluarga inti, tim sukses yang beranggotakan kerabat, dan pemberian bantuan sosial sangat dominan, yang pada gilirannya memperkuat solidaritas komunitas lokal dalam meraih dukungan pemilih. Di samping itu, peran Mosalaki (pemimpin adat) memberikan legitimasi simbolik yang penting, serta kelompok taruna/tani yang berfungsi sebagai arena mobilisasi dengan biaya rendah yang berbasis pada solidaritas sosial di tingkat desa. Jaringan-jaringan sosial ini berkontribusi besar terhadap kesuksesan kampanye, terutama dalam konteks masyarakat Nagekeo yang masih sangat terikat pada ikatan keluarga dan adat. Penelitian ini menggunakan teori klientelisme Herbert Kitschelt (2000) dan jaringan sosial.

Kata kunci: Klientelisme, Jaringan Sosial, Kemenangan Kandidat Perempuan, Pemilu Legislatif.

PENDAHULUAN

Keterwakilan perempuan dalam politik di Kabupaten Nagekeo terutama di DPRD masih menghadapi tantangan besar. Meskipun jumlah pemilih perempuan lebih banyak daripada laki-laki, perempuan di Nagekeo seringkali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan politik. Hal ini tercermin dari kekosongan keterwakilan perempuan yang berlangsung selama tiga periode berturut-turut. Pada periode 2019-2024, tidak ada satupun perempuan yang berhasil terpilih. Sebagai gambaran, dari total 25 kursi DPRD, hanya ada 2 kursi perempuan yang berhasil direbut pada periode 2024-2029, yang menunjukkan adanya perubahan, meskipun masih sangat terbatas.

Berdasarkan data KPU Nagekeo (2024), jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat sebanyak 119.724 pemilih dengan alokasi 25 kursi legislatif yang terbagi ke dalam tiga daerah pemilihan (dapil). Di Dapil III, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meraih 6.076 suara dan berhasil memperoleh dua kursi; salah satunya diraih oleh Maria Roswita Mea Laki dengan perolehan 3.248 suara tertinggi di dapil dan satu-satunya calon legislatif perempuan yang terpilih dari total 68 calon. Diagram berikut ini

Penerbit:

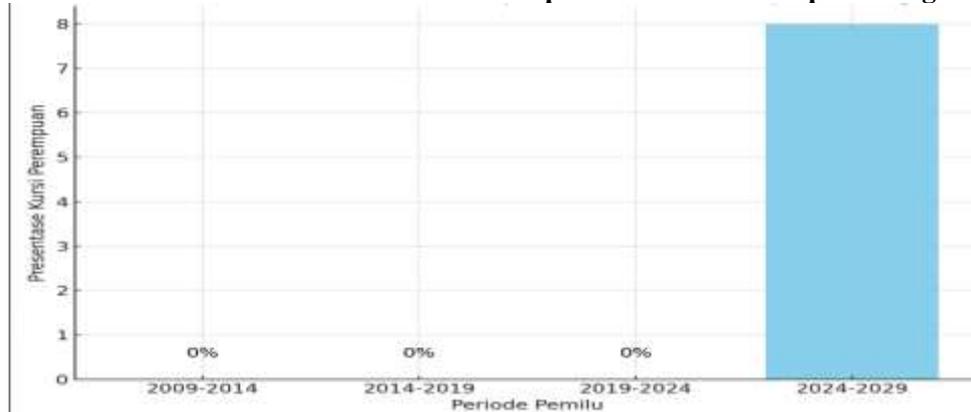
LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



memperlihatkan periodisasi keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Nagekeo, yang menyoroti bagaimana dinamika ini berkembang dari waktu ke waktu.

Gambar 1: Periodisasi Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Nagekeo



Sumber: hasil olahan penelitian, tahun 2025

Dalam menghadapi tantangan tersebut, perempuan di Kabupaten Nagekeo mulai menggunakan strategi klientelisme berbasis kekerabatan sebagai sarana untuk meraih dukungan politik. Klientelisme di sini mengacu pada praktik pemberian bantuan sosial, barang, atau sumber daya lainnya sebagai imbalan atas dukungan politik. Klientelisme menjadi strategi elektoral efektif terutama di wilayah yang bergantung pada sumber daya negara (Aspinall & Sukmajati, 2016; Mietzner, 2013; Aspinall & Berenschot, 2019). Esensi klientelisme adalah pertukaran kontingen *quid pro quo* (Stokes et al., 2013; Hicken, 2011) yang membedakannya dari politik programatik.

Untuk kandidat perempuan yang baru terjun ke politik, seperti Maria Roswita Mea Laki, yang terpilih pada Pemilu 2024, penggunaan jaringan sosial berbasis keluarga, komunitas lokal, dan kelompok adat menjadi kunci utama dalam memperoleh suara. Strategi ini tidak hanya memanfaatkan kedekatan personal dengan pemilih tetapi juga melibatkan jaringan yang sudah ada di masyarakat yang lebih luas, seperti tokoh adat (Mosalaki), keluarga besar, dan tim sukses yang terdiri dari kerabat dekat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana klientelisme berbasis kekerabatan berperan dalam kemenangan kandidat perempuan, khususnya dalam Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Nagekeo 2024. Fokus penelitian adalah untuk mengidentifikasi bagaimana keluarga, tim sukses, kelompok adat, dan komunitas lokal memfasilitasi penggalangan dukungan politik melalui praktik klientelistik. Dengan menggunakan teori klientelisme dan jaringan sosial, penelitian ini mengungkapkan bagaimana peran keluarga inti dan jaringan kekerabatan tidak hanya menjadi modal sosial dalam kampanye tetapi juga berfungsi sebagai saluran untuk mempertahankan dan mengembangkan loyalitas politik di tengah dominasi sistem patriarkal.

METODE

Pendekatan penelitian digunakan untuk menjawab fokus permasalahan yang dikaji. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (single case study) yang bertujuan memahami secara mendalam pengalaman subjektif serta makna sosial yang melekat pada konteks penelitian (Marsh & Stoker, 1995). Sejalan dengan pandangan Creswell (2014), penelitian kualitatif berupaya menelusuri dan menafsirkan realitas sosial melalui pengamatan terhadap kondisi alami tanpa manipulasi variabel (Sugiyono, 2019). Selain itu, Moleong (2018) menegaskan bahwa pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami partisipan, baik berupa perilaku, persepsi, motivasi, maupun tindakan yang muncul dalam konteks sosialnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang difokuskan pada pengalaman dan pandangan para informan. Melalui metode ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman komprehensif tentang bagaimana subjek penelitian menafsirkan peristiwa, membangun makna, serta memandang realitas sosial sebagaimana adanya.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



PEMBAHASAN

Literatur klasik memandang klientelisme sebagai adaptasi terhadap lemahnya institusi (Huntington, 1968; Scott, 1972). Stokes (2005) menambahkan gagasan *perverse accountability* pada pemilih miskin. Hicken (2011) merumuskan tiga ciri klientelisme: kontingen, personal, dan berulang; serta menekankan peran broker. Kitschelt (2007) menawarkan tipologi pertukaran (programatik vs klientelistik vs karismatik) dan kondisi pemilihan strateginya.

Konteks Indonesia ditandai “klientelisme sistemik” (Berenschot, 2018) yang difasilitasi desentralisasi dan sistem proporsional terbuka (Aspinall & Berenschot, 2019). Dalam politik lokal NTT, peran tokoh adat, keluarga, dan komunitas kerap menjadi infrastruktur mobilisasi. Di sisi representasi perempuan, akses sumber daya melalui jaringan kekerabatan/dinasti sering menjadi pintu masuk (Wardani & Singka, 2021; Labonne et al., 2019), namun variasi lokal menunjukkan keluarga dapat berfungsi sebagai mesin politik tanpa status dinastik formal.

Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Nagekeo

Kabupaten Nagekeo, yang terletak di pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki tantangan besar terkait dengan kondisi sosial ekonomi yang masih tertinggal. Berdasarkan data dari Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi NTT 2023 yang dikeluarkan oleh BPS, sekitar 39,5% penduduk Nagekeo hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa hampir 4 dari 10 orang di kabupaten ini bergantung pada bantuan sosial dan sumber pendapatan yang berasal dari sektor pertanian subsisten, yang tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi secara optimal. Kesenjangan sosial antara daerah perkotaan dan pedesaan juga sangat mencolok, di mana wilayah pedesaan yang jauh dari ibu kota kabupaten masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Tingkat kemiskinan yang tinggi ini turut memengaruhi partisipasi politik di Nagekeo, terutama di kalangan perempuan. Banyak perempuan di daerah ini yang terbatas dalam memperoleh pendidikan dan kesempatan ekonomi yang dapat mendukung partisipasi aktif mereka dalam politik. Kemiskinan yang melanda masyarakat Nagekeo, terutama perempuan, menjadikan mereka lebih rentan terhadap praktik politik uang dan politik patronase, yang sering kali digunakan oleh kandidat dalam memperoleh dukungan. Politik uang menjadi salah satu strategi yang umum digunakan dalam memperoleh dukungan dari pemilih yang mengalami kesulitan ekonomi, yang sering kali lebih memilih bantuan langsung daripada mengutamakan pertimbangan politik berbasis visi atau kebijakan.

Elektabilitas Partai Berbasis Agama dalam Konstelasi Politik Daerah

Partai berbasis agama di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan kemampuan adaptasi politik yang kuat di tengah dominasi partai nasionalis dan realitas sosial yang mayoritas beragama Katolik. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTT tahun 2024, partai-partai dengan basis ideologi Islam seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara konsisten memperoleh kursi di sejumlah kabupaten, meskipun secara demografis populasi Muslim di NTT hanya berkisar 8,7% dari total penduduk (BPS NTT, 2023).

Pada Pemilu 2019, PKB memperoleh total 24 kursi DPRD kabupaten/kota di NTT, meningkat menjadi 33 kursi pada Pemilu 2024, sedangkan PAN mempertahankan 18 kursi dan PKS memperoleh 10 kursi. Data ini menunjukkan bahwa partai-partai berbasis agama mampu mengkonversi kekuatan sosial dan jaringan komunitas ke dalam dukungan elektoral yang stabil di wilayah yang secara kultural non-Muslim. Fenomena ini terjadi karena partai-partai agama di NTT, terutama PKB, beroperasi dengan pola politik relasional menempatkan nilai kekeluargaan, solidaritas, dan jaringan lintas komunitas sebagai strategi utama dalam membangun kepercayaan pemilih. Di beberapa kabupaten seperti Flores Timur, Ende, dan Nagekeo, PKB diketahui berhasil menembus wilayah mayoritas Katolik dengan pendekatan berbasis sosial-kultural, bukan mobilisasi identitas agama.

Temuan Cakra Wikara Indonesia (CWI) mengenai partisipasi politik perempuan 2019-2024 menunjukkan kecenderungan perempuan mendaftar dan berkompetisi melalui partai-partai berbasis agama (terutama PKB/PPP), karena akses jaringan lokal dan dukungan struktur organisasi keagamaan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



relatif lebih tersedia dibanding kanal partai nasionalis tertentu; tren ini juga tampak pada beberapa kontestasi kepala daerah di mana kandidat perempuan yang diusung partai agama berhasil menang.

Kabupaten Nagekeo memperlihatkan secara empiris bagaimana strategi tersebut berjalan. Berdasarkan rekapitulasi KPU Nagekeo (2024), PKB mengalami peningkatan perolehan suara signifikan dari 9.812 suara pada Pemilu 2019 menjadi 12.901 suara pada 2024, sehingga perolehan kursi meningkat dari tiga menjadi lima dari total 25 kursi DPRD. Di Dapil III Boawae, PKB bahkan mencatat kemenangan simbolik dengan terpilihnya Maria Roswita Mea Laki satu-satunya legislator perempuan dari 68 calon legislatif di dapil tersebut yang memperoleh 3.248 suara individu dari total suara partai 6.076. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap PKB di Nagekeo tidak berbasis agama, tetapi berakar pada jaringan sosial dan budaya yang terbentuk melalui hubungan keluarga, komunitas adat, serta komunitas keagamaan lintas denominasi seperti Orang Muda Katolik (OMK). Meski basis pemilih Katolik di Nagekeo mencapai lebih dari 90% (BPS, 2023), CWI juga mencatat bahwa pola kemenangan kandidat perempuan yang diusung partai agama pada pilkada terjadi di beberapa daerah, menandakan bahwa kendaraan partai berbasis agama dapat menjadi “jalur masuk” yang efektif ketika dikombinasikan dengan modal sosial lokal persis seperti konfigurasi dukungan yang bekerja pada kasus Nagekeo.

Hambatan dan Tantangan Perempuan di Legislatif Nagekeo

Kekosongan kursi perempuan di DPRD Nagekeo selama tiga periode berturut-turut merefleksikan akumulasi kendala institusional, konfigurasi pasar elektoral, dan norma sosial yang saling mengukuhkan. Pada aras institusional, ketentuan afirmatif 30% caleg perempuan tidak otomatis berujung pada keterpilihan karena desain proporsional daftar terbuka menempatkan kompetisi pada perolehan suara individu; penempatan nomor urut yang kurang strategis tanpa dukungan logistik partai (APK, relawan, jadwal tatap muka prioritas) tidak terkonversi menjadi kursi. Selain itu, besaran kursi per dapil yang relatif kecil meningkatkan ambang efektif suara, sehingga dalam “pasar suara” yang sempit kandidat berjejaring patronase kuat umumnya laki-laki dan/atau *incumbent* cenderung menyapu kursi. Di tingkat internal partai, seleksi berbasis “keterpilihan” kerap dioperasionalisasi sebagai kecukupan modal kampanye, akses pada tokoh lokal, serta kemampuan membangun mesin saksi hingga TPS; kuota perempuan acap kali dipenuhi di tahap administrasi, tetapi tidak diikuti alokasi sumber daya yang setara, menciptakan bottleneck pada fase ground game yang menentukan personal vote.

Ekologi elektoral Nagekeo yang tersebar antardesa dengan ongkos mobilisasi tinggi juga membuat biaya per suara mahal; patronase aktor kunci (adat/agama, pengusaha lokal, elite partai) menjadi pengurang cost per vote, namun jaringan historisnya didominasi figur laki-laki sehingga transfer legitimasi ke kandidat perempuan bersifat sporadis dan bergantung kedekatan personal. Rantai hasil ini memproduksi umpan balik negatif: absennya legislator perempuan pada periode sebelumnya memperkuat persepsi “kurang viabel”, yang kemudian menekan rekrutmen, pendanaan, dan dukungan lapangan pada periode berikutnya. Di sisi kultural, pembagian peran gender yang memaskulinikan politik berimplikasi pada rekrutmen relawan, penerimaan pemilih, dan keberanian partai memberi nomor urut strategis; beban ganda domestik serta risiko pelecehan politik meningkatkan *attrition* pada fase krusial kampanye, mengurangi intensitas *canvassing* tatap muka atau bahkan memicu pengunduran diri sehingga bukan hanya entri kandidat yang terhambat, melainkan juga retensi dan pembentukan lintasan karier politik perempuan yang berkesinambungan.

Budaya dan Adat di Nagekeo

Budaya dan adat istiadat di Nagekeo memainkan peran penting dalam membentuk peran perempuan dalam politik. Masyarakat Nagekeo yang sangat terikat pada adat istiadat dan peran *Mosalaki* (pemimpin adat) menciptakan hambatan bagi perempuan dalam mencapai posisi politik yang lebih tinggi. Secara tradisional, perempuan dianggap tidak memiliki tempat dalam struktur pengambilan keputusan politik yang dominan didominasi oleh laki-laki, baik dalam keluarga maupun masyarakat adat. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik.

Meskipun budaya adat di Nagekeo bersifat patriarkal, nilai-nilai adat ini juga menawarkan peluang bagi perempuan yang mampu mengintegrasikan diri ke dalam sistem sosial yang ada. Perempuan yang dapat memanfaatkan modal sosial yang terbentuk melalui ikatan keluarga dan komunitas adat memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan politik. Pada Pemilu 2024, strategi yang digunakan oleh perempuan untuk memenangkan dukungan melibatkan pemanfaatan jaringan sosial tradisional, yang sering kali berbasis pada hubungan kekeluargaan dan kegiatan adat. Hal ini menunjukkan bahwa budaya adat bisa menjadi saluran bagi perempuan untuk memperkuat posisi mereka dalam politik, asalkan mereka dapat mengoptimalkan peran sosial yang telah ada.

Peluang Praktik Klientelistik di Kabupaten Nagekeo

Klientelisme atau politik patronase memainkan peran penting dalam menentukan hasil pemilu. Banyak kandidat di daerah ini, baik perempuan maupun laki-laki, yang menggunakan politik uang sebagai salah satu strategi untuk memperoleh dukungan dari pemilih. Dalam masyarakat yang ekonominya masih bergantung pada sektor pertanian subsisten, politik uang menjadi cara yang efektif untuk menggalang dukungan, terutama dari pemilih yang terhimpit oleh kondisi ekonomi. Praktik ini sering kali melibatkan distribusi bantuan sosial langsung kepada pemilih yang membutuhkan, seperti pemberian sembako atau bantuan tunai, yang dapat memengaruhi preferensi mereka saat memilih.

Bagi kandidat perempuan, terutama yang tidak memiliki sumber daya politik dan ekonomi yang besar, politik klientelistik menjadi jalur yang memungkinkan mereka memperoleh dukungan pemilih. Perempuan yang terlibat dalam politik di Nagekeo sering kali mengandalkan jaringan sosial yang ada di komunitas mereka, baik itu melalui kelompok perempuan, tokoh adat, atau pemimpin agama, untuk mendistribusikan bantuan dan memperoleh suara. Maria Roswita Mea Laki, yang berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Nagekeo pada Pemilu 2024, memanfaatkan pendekatan ini untuk membangun dukungan dari masyarakat melalui jalur bantuan sosial dan distribusi kesejahteraan berbasis komunitas adat dan kelompok perempuan.

Perempuan Menang Karena Memiliki Modal

Keberhasilan dalam Pemilu 2024 di Nagekeo, yang mengantarkan Maria Roswita Mea Laki ke kursi DPRD, tidak hanya disebabkan oleh kemampuannya dalam berkomunikasi politik, tetapi juga oleh modal sosial yang ia miliki. Modal sosial ini dibangun melalui jaringan keluarga, kelompok perempuan, dan komunitas adat yang ada di Nagekeo. Sebagai seorang kandidat perempuan, Maria Roswita mampu memanfaatkan kekuatan jaringan sosial yang telah terbangun di komunitasnya untuk menggalang dukungan. Meskipun politik uang dan patronase memiliki peran dalam proses elektoral, strategi Maria yang mengoptimalkan jaringan tradisional dan hubungan kekeluargaan memberikan keunggulan tersendiri yang membedakannya dari kandidat lainnya.

Modal sosial memainkan peran yang lebih besar daripada sekadar akses ke dana kampanye. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal pendanaan dan akses ke sumber daya politik lainnya, mereka masih dapat mengandalkan jaringan sosial yang kuat untuk memperoleh dukungan. Penelitian oleh Schuler (2024) menunjukkan bahwa kandidat perempuan yang memiliki akses ke modal sosial yang kuat lebih mungkin untuk berhasil dalam pemilu, meskipun mereka menghadapi tantangan besar dalam hal pendanaan.

Kemenangan Maria Roswita Mea Laki Sebagai Dprd Kabupaten Nagekeo Tahun 2024

Keluarga sebagai Mesin Politik

Sebagaimana dikemukakan Aspinall (2016), keluarga merupakan unit sosial paling dasar yang tidak hanya menjadi sumber dukungan moral, tetapi juga berperan sebagai “pemilih tetap” (*core voters*) yang jarang berpindah pilihan politik karena keterikatan emosional dan loyalitas genealogis. Kemenangan Maria Roswita Mea Laki tampak jelas keluarga besar berfungsi sebagai pusat koordinasi, penyandang dana, dan penguat legitimasi sosial dalam keseluruhan proses kampanye. Keluarga menyuplai dana kampanye sekitar Rp 400 juta (Yano, 2024) yang digunakan untuk mendukung kegiatan politik selama masa sosialisasi dan kampanye terbuka. Dana ini dialokasikan untuk pembuatan serta

distribusi alat peraga kampanye (APK) seperti baliho, spanduk, dan poster yang tersebar merata di delapan kelurahan dan sembilan belas desa di Kecamatan Boawae.

Keluarga juga memainkan peran penting dalam penentuan lokasi kampanye. Kegiatan kampanye tidak berpusat di ruang publik atau fasilitas partai, tetapi difokuskan di rumah-rumah kerabat yang tersebar di berbagai desa dan kelurahan, seperti Nageoga, Nagesapadhi, Natanage Timur, Olakile, Rega, Ratongamobo, Focolodorawe, dan Wolowae Barat. Rumah kerabat difungsikan sebagai posko informal dan titik pertemuan antara kandidat dan pemilih potensial, sekaligus ruang sosial untuk membangun komunikasi politik berbasis kekeluargaan. Dalam setiap pertemuan, narasi yang ditekankan bukan janji politik atau agenda kebijakan, melainkan ikatan emosional dan kedekatan genealogis, yang disampaikan dalam suasana kekeluargaan dan penuh keakraban.

Seluruh biaya konsumsi selama kegiatan kampanye termasuk makan, minum, dan logistik pertemuan ditanggung oleh keluarga besar. Hal ini menciptakan suasana gotong royong dan memperkuat solidaritas internal jaringan kekerabatan, sekaligus mengurangi beban finansial bagi tim sukses lokal di tiap wilayah. Dukungan ekonomi keluarga dalam bentuk penyediaan konsumsi juga memiliki fungsi simbolik karena merepresentasikan kemurahan hati (*generosity*) dan tanggung jawab moral terhadap sesama kerabat, yang dalam konteks budaya Flores menjadi nilai sosial penting dalam membangun rasa percaya dan loyalitas politik.

Keluarga besar juga terlibat aktif dalam ritus sosial dan kegiatan keagamaan sebagai strategi memperluas legitimasi sosial. Kehadiran keluarga kandidat pada acara pesta pernikahan, upacara kematian, misa syukur, serta gotong royong pembangunan gereja dan sekolah berfungsi sebagai bentuk komunikasi simbolik yang memperlihatkan kehadiran sosial kandidat di tengah masyarakat. Dalam konteks budaya lokal, tindakan semacam ini menciptakan "*moral claim*" terhadap dukungan politik, karena kandidat dianggap sebagai bagian dari komunitas yang berbagi beban sosial dan emosional dengan warga.

Selain dukungan simbolik dan sosial, keluarga juga berperan dalam distribusi manfaat ekonomi yang bersifat klientelistis. Keluarga besar Maria menyalurkan bantuan kebutuhan pokok (sembako), dukungan dana untuk kegiatan sekolah dan gereja, material bangunan rumah (seperti semen, pasir, dan batu), serta fasilitasi penggunaan lahan dan alat pertanian bagi warga Boawae. Praktik ini menciptakan hubungan timbal balik antara pemberi dan penerima, di mana pemberian dianggap sebagai bentuk perhatian dan penerima membalasnya melalui dukungan elektoral. Dalam terminologi Hicken (2011) dan Stokes et al. (2013), fenomena ini merepresentasikan bentuk pertukaran kontingen (*contingent exchange*) relasi timbal balik antara patron dan klien yang berorientasi pada hasil politik.

Dengan demikian, keluarga dalam konteks kemenangan Maria Roswita tidak hanya berfungsi sebagai unit domestik yang memberikan dukungan moral, melainkan sebagai aktor politik aktif yang memobilisasi sumber daya ekonomi, sosial, dan simbolik. Keluarga berperan sebagai broker kepercayaan (*trust broker*) yang menjembatani hubungan antara kandidat dan konstituen melalui jaringan informal yang berlapis: dari rumah tangga, kekerabatan, komunitas, hingga jejaring keagamaan. Dalam konteks masyarakat dengan struktur sosial komunal seperti Nagekeo, strategi ini efektif karena menggabungkan modal sosial bonding (kedekatan internal antarkerabat) dengan modal sosial bridging (koneksi lintas komunitas), yang pada akhirnya memperkuat daya jangkau politik kandidat perempuan dalam sistem yang masih maskulin.

Tim Sukses Beranggotakan Kerabat

Jaringan tim sukses berperan sebagai jembatan utama antara keluarga besar dan pemilih di lapangan. Tim ini bukan sekadar perangkat kampanye formal, melainkan perpanjangan struktur sosial kekerabatan yang menjadi tulang punggung operasional dalam setiap tahapan politik elektoral. Hampir seluruh posisi strategis dalam tim seperti koordinator wilayah, bendahara lapangan, hingga penghubung desa diisi oleh anggota keluarga dan kerabat dekat yang memiliki hubungan genealogis dengan kandidat. Pola ini menunjukkan bentuk organisasi politik berbasis kepercayaan personal (*trust-based organization*) yang khas dalam politik lokal Indonesia, di mana hubungan kekeluargaan menjadi dasar loyalitas elektoral (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Tim sukses yang beranggotakan kerabat menjalankan fungsi ganda: di satu sisi sebagai penggerak kampanye dan mobilisasi suara, di sisi lain sebagai penjaga stabilitas dukungan politik keluarga di tingkat akar rumput. Struktur tim tidak bersifat hierarkis seperti dalam partai politik, melainkan bekerja secara horizontal dan cair mengikuti alur hubungan kekerabatan dan kewilayahan. Keanggotaan tim yang homogen secara sosial menjamin adanya rasa saling percaya dan loyalitas yang kuat, sehingga risiko perpecahan atau kebocoran informasi politik dapat diminimalisir. Sebagaimana dijelaskan Edward Aspinall (2016), jaringan sosial yang diikat oleh hubungan kekerabatan memungkinkan terciptanya bentuk “*bounded trust*”, yakni kepercayaan tertutup di dalam kelompok sosial yang meningkatkan efektivitas pertukaran politik dan mengurangi kemungkinan deviasi suara.

Pada level operasional, tim sukses memegang peranan penting dalam pengamanan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan temuan lapangan, di Kecamatan Boawae terdapat 124 TPS, dan setiap TPS menempatkan dua orang saksi yang berasal dari jaringan keluarga dan kerabat. Para saksi ini dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu saksi dalam dan saksi luar. Saksi dalam adalah individu yang telah dipastikan memiliki loyalitas penuh terhadap Maria Roswita Mea Laki dan termasuk dalam lingkaran inti keluarga besar atau tim terdekat; mereka bertugas di TPS strategis untuk memastikan suara kandidat tidak bergeser ke pihak lain. Sementara itu, saksi luar adalah individu yang masih memiliki peluang berpindah dukungan, baik karena relasi sosial dengan kandidat lain maupun karena posisi politik yang lebih cair. Mereka direkrut dari simpatisan yang belum sepenuhnya terikat, dan fungsi utamanya adalah memantau dinamika dukungan serta menjaga komunikasi dengan kelompok pemilih yang belum stabil.

Strategi pembagian peran antara saksi dalam dan saksi luar ini memperlihatkan tingkat profesionalisasi politik berbasis lokal yang tidak kalah kompleks dibandingkan struktur partai formal. Dalam konteks klientelisme, hal ini sejalan dengan pengamatan Aspinall & Berenschot (2019) yang menegaskan bahwa jaringan politik informal bekerja paling efektif ketika mampu memetakan secara presisi tingkat loyalitas dan potensi pembelotan pemilih. Dengan menempatkan saksi dalam pada posisi TPS yang dianggap “basis keluarga”, dan saksi luar di TPS dengan potensi swing voters, tim sukses Maria Roswita secara strategis membangun sistem pengamanan suara yang adaptif terhadap risiko politik lokal.

Setiap saksi menerima honor sebesar Rp400.000, dengan total pengeluaran mencapai sekitar Rp99,2 juta untuk seluruh 248 saksi di 124 TPS. Dana ini berasal dari kontribusi keluarga besar, yang sekaligus memperlihatkan keterpaduan antara dukungan finansial dan strategi politik keluarga. Namun lebih dari sekadar insentif ekonomi, pemberian honor juga berfungsi sebagai pengikat loyalitas dan simbol kepercayaan antara kandidat dan saksi. Dalam banyak kasus, seperti dikemukakan Hicken (2011) dan Stokes et al. (2013), pemberian insentif material kepada jaringan perantara merupakan mekanisme penting dalam mempertahankan stabilitas hubungan patron-klien di tingkat mikro, karena memperkuat rasa keterikatan moral (*moral obligation*) dan kepercayaan timbal balik (*reciprocal trust*).

Tim sukses juga menjadi aktor penting dalam membangun narasi politik kekeluargaan di lapangan. Setiap kegiatan tatap muka dengan pemilih dilakukan dalam suasana informal, sering kali diselenggarakan di rumah anggota keluarga atau simpatisan yang memiliki pengaruh sosial di lingkungannya. Bahasa komunikasi yang digunakan bukanlah retorika politik formal, melainkan narasi keakraban sosial, seperti ikatan adat, kedekatan antar-marga, atau hubungan pernikahan. Pendekatan ini menjadikan kampanye lebih bersifat sosial daripada ideologis, dan lebih mengandalkan emosional bonding ketimbang persuasi rasional. Sejalan dengan hal tersebut, Aspinall (2014) dalam studinya tentang politik elektoral di Indonesia menegaskan bahwa keberhasilan mobilisasi politik di tingkat lokal kerap bergantung pada kemampuan kandidat mengubah hubungan personal menjadi hubungan politik melalui simbol-simbol sosial yang dipahami bersama oleh masyarakat.

Tokoh Adat (Mosalaki) Sebagai Legitimasi Simbolik

Dukungan Mosalaki menjadi faktor penting dalam mengokohkan legitimasi politik dan kultural. Para Mosalaki di wilayah seperti Wudu, Rega, Natanage, dan Wolowae aktif mengonsolidasikan dukungan melalui forum adat, pertemuan komunitas, dan komunikasi langsung dengan warga. Dukungan tersebut tidak disampaikan dalam bentuk kampanye politik formal, melainkan melalui

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



bahasa adat dan simbol budaya yang menekankan nilai solidaritas genealogis. Pesan yang disampaikan, seperti “*ta lelu to’o, ta woe ta eko*” (tidak meninggalkan keluarga sendiri), dimaknai masyarakat sebagai seruan moral untuk mendukung “anak adat sendiri” dalam kontestasi politik.

Mosalaki tidak hanya memberikan dukungan simbolik, tetapi juga memfasilitasi kegiatan kampanye bernilai budaya, seperti menyediakan rumah adat (*sa’o*) dan tanah ulayat sebagai tempat pertemuan warga dan kegiatan sosialisasi politik. Kehadiran Mosalaki dalam kegiatan tersebut memberi legitimasi moral terhadap kampanye Maria, mengubah dukungan politik menjadi bentuk kewajiban moral kolektif bagi komunitas adat. Sejalan dengan temuan Aspinall (2014) dan Berenschot (2018), praktik ini menunjukkan bagaimana elite lokal atau pemimpin adat bertindak sebagai *broker moral* yang mentransformasikan dukungan politik menjadi perintah sosial yang ditaati secara kolektif.

Peran Mosalaki dalam jaringan politik Maria juga terlihat dalam ritual dan pertemuan adat menjelang masa kampanye, di mana kandidat secara simbolik memberikan *bua loki* (sirih pinang) dan kontribusi kecil bagi kegiatan adat sebagai bentuk penghormatan terhadap tatanan budaya. Tindakan ini dipandang masyarakat sebagai bentuk kesopanan (*lelu woe*) sekaligus pengakuan atas otoritas Mosalaki, yang kemudian dibalas dengan komitmen dukungan politik dari warga adat. Dengan cara ini, Mosalaki tidak sekadar bertindak sebagai pendukung, tetapi sebagai pengikat moral kolektif yang mengonversi penghormatan terhadap adat menjadi suara elektoral yang nyata.

Komunitas Sebagai Arena Mobilisasi

Jaringan komunitas yang terdiri dari kelompok taruna, kelompok tani, dan komunitas gereja berfungsi sebagai arena mobilisasi politik yang efektif, terutama karena sifatnya yang inklusif dan berbasis kegiatan sosial. Komunitas-komunitas ini menjadi ruang interaksi sosial yang produktif, di mana aktivitas non-politis seperti kerja bakti, pertemuan rutin, dan kegiatan ekonomi bersama digunakan sebagai sarana untuk membangun komunikasi politik informal. Strategi ini memungkinkan proses *canvassing door-to-door* berjalan lebih efisien tanpa memerlukan biaya tinggi, sekaligus menjaga citra kampanye tetap dalam bingkai kegiatan sosial dan keagamaan.

Keterlibatan Maria dalam komunitas Orang Muda Katolik (OMK) memainkan peran penting dalam memperkuat dukungan dari basis pemilih muda. Sebagai anggota aktif OMK di Boawae, Maria telah lama dikenal melalui kegiatan sosial-keagamaan seperti misa lingkungan, pelayanan sosial gereja, dan kegiatan kepemudaan lintas paroki. Dari keikutsertaannya ini, terbentuk solidaritas emosional dan kepercayaan (*trust*) yang kuat antaranggota komunitas, yang kemudian bertransformasi menjadi dukungan politik ketika ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Keakraban dan pengalaman kolektif semasa menjadi anggota OMK menciptakan modal sosial berbasis kepercayaan dan kedekatan personal, yang menurut Putnam (1993) merupakan salah satu fondasi *bonding social capital*, ikatan sosial yang memperkuat loyalitas dan koordinasi antaranggota kelompok.

Komunitas OMK berperan sebagai agen mobilisasi non-partisan yang memperluas jangkauan dukungan Maria, terutama di kalangan generasi muda Katolik di Boawae dan sekitarnya. Aktivitas mereka dalam kampanye tidak dilakukan secara formal, tetapi melalui jejaring sosial dan komunikasi antaranggota, seperti mengajak keluarga atau rekan kerja untuk memilih “sesama anggota OMK” sebagai bentuk dukungan moral. Hubungan ini menciptakan efek psikologis dan sosial yang kuat rasa kebersamaan dan identifikasi kolektif yang membuat anggota komunitas merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung Maria sebagai representasi mereka di lembaga legislatif. Fenomena ini menunjukkan bagaimana identitas keagamaan dan solidaritas komunitas dapat berfungsi sebagai instrumen politik yang efektif di luar struktur partai formal.

Selain jaringan OMK, kelompok taruna dan tani di wilayah seperti Boawae, Nageoga, dan Rega juga menjadi bagian dari sistem mobilisasi berbiaya rendah. Mereka mengorganisasi kegiatan sosial seperti kerja bakti lingkungan, mendirikan tenda perayaan adat, hingga membantu kegiatan panen bersama, yang menjadi media alami untuk menyampaikan pesan politik. Dalam setiap kegiatan, diskusi politik muncul secara organik di tengah percakapan sehari-hari, memperkuat citra Maria sebagai figur yang dekat dengan kehidupan masyarakat desa. Model mobilisasi semacam ini sejalan dengan temuan Aspinall & Berenschot (2019) yang menegaskan bahwa kampanye berbasis relasi sosial sering kali lebih efektif di tingkat lokal dibandingkan pendekatan programatik atau ideologis.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



Dukungan komunitas juga memperlihatkan dimensi legitimasi sosial horizontal, di mana hubungan antaranggota dibangun atas dasar kesetaraan dan solidaritas, bukan patronase vertikal. Dalam konteks ini, dukungan terhadap Maria tidak lahir dari hubungan transaksional, tetapi dari pengakuan sosial atas kontribusinya dalam kehidupan komunitas, baik sebagai anggota OMK maupun sebagai warga yang aktif dalam kegiatan sosial. Hubungan horizontal semacam ini memperkuat kepercayaan kolektif terhadap kandidat dan menumbuhkan rasa memiliki di antara anggota komunitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan analisis di atas maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan di Nagekeo masih tersendat oleh hambatan struktural dan kultural, namun dapat ditembus melalui aktivasi modal sosial berbasis kekerabatan yang terorganisasi. Tiga periode kekosongan kursi perempuan berakhir pada Pemilu DPRD 2024 ketika Maria Roswita Mea Laki menang di Dapil III dengan dukungan yang terstruktur dari empat simpul broker: keluarga sebagai mesin politik (pembayaran, logistik, dan legitimasi sosial), tim sukses beranggotakan kerabat yang mengelola pengaman suara hingga tingkat TPS (saksi dalam-luar), Mosalaki sebagai pemberi legitimasi simbolik yang mengkonversi dukungan menjadi kewajiban moral kolektif, serta komunitas lokal, seperti OMK, kelompok taruna, dan tani sebagai arena mobilisasi berbiaya rendah yang memperluas jangkauan di luar lingkaran keluarga. Temuan ini menegaskan beroperasinya klientelisme kekerabatan sebagai mekanisme efektif di konteks sosial-ekonomi rentan, sekaligus memperlihatkan bahwa modal sosial bonding dan bridging dapat dikonversi menjadi dukungan elektoral yang nyata bagi kandidat perempuan pemula.

Implikasinya, peningkatan representasi perempuan di daerah dengan karakteristik sosial serupa tidak cukup mengandalkan kuota dan rekrutmen formal partai; dibutuhkan penguatan institusional yang mengurangi biaya kontestasi, memperluas akses pendanaan yang akuntabel, serta membangun kanal dukungan programatik agar kompetisi tidak semata bertumpu pada patronase. Di Nagekeo, keterikatan adat dan jaringan keagamaan dapat menjadi aset bila ditata sebagai jembatan partisipasi politik yang etis dan transparan, bukan sekadar alat pertukaran kontingen. Penelitian lanjutan perlu menguji daya replikasi pola empat simpul broker ini lintas dapil dan kabupaten di NTT, menilai kontribusi relatif tiap simpul terhadap perolehan suara pada level TPS, serta membandingkan efektivitas strategi kekerabatan dengan strategi programatik dalam menumbuhkan keberlanjutan representasi perempuan di periode berikutnya.

REFERENSI

- Amalia. (2018). *Klientelisme Elektoral sebagai Strategi Pemenangan Pasangan Fadly–Asrul dalam Pilkada Kota Padang Panjang 2018* [Skripsi].
- Aspinall, E. (2014). When brokers betray: Clientelism, social networks, and electoral politics in Indonesia.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia*.
- Berenschot, W. (2018). The political economy of clientelism; Clientelism Index (CIP).
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital.
- Buehler, M. (2010). Decentralisation and local patronage in Indonesia.
- Hadiz, V. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia*.
- Hicken, A. (2011). Clientelism. *Annual Review of Political Science*, 14, 289–310.
- Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies*.
- Kitschelt, H. (2007). Political clientelism, programmatic politics, and democratic accountability.
- Kitschelt, H., & Wilkinson, S. (2007). *Patrons, Clients, and Policies*.
- Labonne, J., Parsa, S., & Querubín, P. (2019). Female political dynasties and term limits (Philippines).
- Lees-Marshment, J. (2001). *Political Marketing and British Political Parties*.
- Mietzner, M. (2013). Money, power, and ideology in Indonesia's parties.
- Muhtadi, B. (2023). Defisit demokrasi dan budaya klientelisme di Indonesia.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

- Putnam, R. (1993). *Making Democracy Work*.
- Scott, J. C. (1972). Patron-client politics and political change in Southeast Asia.
- Stokes, S. C. (2005). Perverse accountability: A formal model of machine politics.
- Stokes, S., Dunning, T., Nazareno, M., & Brusco, V. (2013). *Brokers, Voters, and Clientelism*.
- Van Klinken, G. (2014). Indonesian politics and familial leadership.
- Wardani, R., & Singka, M. (2021). Dinasti politik dan perempuan terpilih 2019.
- Yin, R. K. (2003). *Case Study Research: Design and Methods*.
- Rohi, R. (2019). *Politik Lokal dan Demokrasi di Nusa Tenggara Timur: Dinamika Kekuasaan dan Representasi di Tingkat Lokal*.
- Yano, F. (2024). *Modal Sosio-Politik Kemenangan Caleg Perempuan pada Pemilu 2024: Studi Kasus Terpilihnya Maria Roswita Mea Laki di Dapil III Kabupaten Nagekeo*.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:

